

# Tarakan *Smart City*: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Layanan Publik melalui *E-Government*

Margareta<sup>a,1</sup>, Anastasia Vienessa Putri<sup>b,2</sup>, Deby Naya Maskut<sup>c,3</sup>, Rosdiana Meni Kwuta<sup>d,4</sup>,  
Baren Sipayung<sup>e,5\*</sup>

<sup>a,b,c,d,e</sup> Politeknik Bisnis Kaltara

<sup>1</sup> [margaretanull2@gmail.com](mailto:margaretanull2@gmail.com), <sup>2</sup> [anastasiaanassspt@gmail.com](mailto:anastasiaanassspt@gmail.com), <sup>3</sup> [nayamaskut@gmail.com](mailto:nayamaskut@gmail.com),

<sup>4</sup> [rosdyaakwuta@gmail.com](mailto:rosdyaakwuta@gmail.com), <sup>5</sup> [baren.sipayung@gmail.com](mailto:baren.sipayung@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

### Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Oktober 2024

Direvisi: 15 November 2024

Disetujui: 23 Desember 2024

Tersedia Daring: 1 Januari 2025

### Kata Kunci:

Pemerintahan Elektronik

Transparansi

Akuntabilitas

Teknologi Informasi

Pelayanan Publik

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan *e-government* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di Indonesia. Permasalahan yang diangkat adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik yang dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan menurunkan kepercayaan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana *e-government* dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-government* berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik melalui penyediaan informasi publik yang terbuka dan mudah diakses, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran publik, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Namun, implementasi *e-government* juga menghadapi tantangan, seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan kurangnya literasi digital. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur digital, memperkuat sistem keamanan data, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta mengembangkan aplikasi dan platform *e-government* yang terintegrasi dan mudah diakses. Gagasan "Tarakan Smart City" yang dikemukakan dalam penelitian ini menawarkan sebuah model pengembangan *smart city* yang komprehensif dan terintegrasi dengan mengintegrasikan *e-government* dalam berbagai aspek kehidupan perkotaan.

## ABSTRACT

### Keywords:

*E-government*

Transparency

Accountability

Information Technology

Public Services

*This study examines the utilization of e-government to enhance transparency and accountability in public services in Indonesia. The main issue addressed is the lack of transparency and accountability in the delivery of public services, which can hinder the realization of good governance and erode public trust. The aim of this research is to analyze how e-government can be implemented to improve transparency and accountability in public services, as well as to identify the challenges and strategies in its implementation. The research method used is a literature review, analyzing various relevant sources such as academic journals, research reports, and policy documents. The findings of the study indicate that e-government has the potential to enhance transparency and accountability in public services through the provision of publicly accessible and transparent information, empowering the public in overseeing the use of public funds, and improving the efficiency and effectiveness of bureaucracy. However, the implementation of e-government also faces challenges, such as the digital divide, data security issues, and a lack of digital literacy. This study recommends that the government improve digital infrastructure, strengthen data security systems, enhance public digital literacy, and develop integrated and user-friendly e-government applications and platforms. The concept of "Tarakan Smart City" presented in this study offers a comprehensive and integrated smart city development model by incorporating e-government into various aspects of urban life.*

©2025, Margareta, Anastasia Vienessa Putri, Deby Naya Maskut,  
Rosdiana Meni Kwuta, Baren Sipayung  
This is an open access article under CC BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu inovasi yang penting adalah kemunculan *e-government* atau pemerintahan elektronik, yang memanfaatkan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong implementasi *e-government*, seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 terkait Kebijakan *E-Government*. Kebijakan ini menekankan pentingnya pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, implementasi *e-government* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi publik, kurangnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, serta masih terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, penelitian sebelumnya (Sipayung *et al.*, 2022; Umiyati *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi *e-government*. Rendahnya kompetensi SDM dalam bidang TIK (Nainggolan *et al.*, 2022) dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola sistem *e-government* yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi *e-government*.

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan *e-government* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis bagaimana *e-government* dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi dalam implementasinya. Penelitian ini juga akan mengusulkan sebuah gagasan "Tarakan *Smart City*" sebagai sebuah model pengembangan *smart city* yang komprehensif dan terintegrasi dengan mengintegrasikan *e-government* dalam berbagai aspek kehidupan perkotaan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini menawarkan sebuah perspektif baru dalam memahami peran *e-government* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Penelitian ini tidak hanya menganalisis implementasi *e-government* dari sisi teknis, tetapi juga melihat dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik. Kedua, penelitian ini mengusulkan gagasan "Tarakan *Smart City*" sebagai sebuah model pengembangan *smart city* yang komprehensif dan terintegrasi. Gagasan ini menawarkan sebuah kerangka kerja yang sistematis untuk mengimplementasikan *e-government* dalam berbagai aspek kehidupan perkotaan. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang komprehensif dengan menganalisis berbagai sumber relevan, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemanfaatan *e-government* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Musri *et al.* (2024) menunjukkan bahwa *e-government* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Penelitian lain oleh Rifdan *et al.* (2024) menunjukkan bahwa *e-government* dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik

di tingkat kecamatan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian-penelitian tersebut masih terfokus pada aspek teknis dari *e-government* dan belum banyak menganalisis dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik. Kedua, penelitian-penelitian tersebut belum menawarkan sebuah model pengembangan *smart city* yang komprehensif dan terintegrasi.

Berdasarkan survei literatur yang dilakukan, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang akan diisi oleh penelitian ini. Pertama, penelitian ini akan menganalisis dampak *e-government* terhadap transparansi dan akuntabilitas layanan publik secara lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik. Kedua, penelitian ini akan mengusulkan gagasan "Tarakan *Smart City*" sebagai sebuah model pengembangan *smart city* yang komprehensif dan terintegrasi. Ketiga, penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan terukur bagi pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik melalui *e-government*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *e-government* terhadap transparansi dan akuntabilitas layanan publik di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang diperlukan dalam implementasinya untuk meningkatkan kedua aspek tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan merumuskan konsep "Tarakan *Smart City*" sebagai model pengembangan *smart city* yang menyeluruh dan terintegrasi, guna memberikan solusi inovatif bagi peningkatan kualitas layanan publik di era digital serta mengidentifikasi tantangan dan strategi dalam implementasinya, termasuk tantangan dalam literasi dan inklusi digital seperti yang dijelaskan oleh Fuad *et al.* (2023) dan Hendrayady *et al.* (2024).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dengan memperdalam pemahaman mengenai peran *e-government* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik, sekaligus menyarankan model pengembangan *smart city* yang terintegrasi. Secara praktis, penelitian ini menyajikan rekomendasi yang spesifik dan terukur untuk pemerintah dalam memaksimalkan penerapan *e-government* guna memperbaiki layanan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang relevan bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi dan kebijakan yang optimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan *e-government*.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengevaluasi pengaruh *e-government* terhadap transparansi dan akuntabilitas layanan publik di Indonesia. Pemilihan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menggali informasi terdokumentasi secara sistematis dari berbagai literatur yang relevan (Kitchenham, 2004). Data yang dianalisis berupa data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber terverifikasi, seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur menggunakan kata kunci "e-government", "transparansi", "akuntabilitas", dan "pelayanan publik" sebagaimana dijelaskan penelitian sebelumnya oleh Abu-Shanab dan Harb (2019). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memahami informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi *e-government* sebagai strategi utama untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan publik. Inisiatif ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih terintegrasi dan responsif melalui pemanfaatan TIK. Salah satu fokus utama *e-government* adalah memodernisasi manajemen pemerintahan secara menyeluruh, yang mencakup peningkatan efisiensi, pengembangan

layanan baru, dan perbaikan infrastruktur informasi global. Sebagaimana dijelaskan oleh Sosiawan (2008), langkah ini tidak hanya memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga membuka peluang partisipasi warga negara yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, *e-government* berfungsi sebagai sarana untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui *platform* digital yang mempermudah akses informasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga menguatkan lingkungan demokratis yang inklusif. Fasilitas digital yang ditawarkan memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam isu-isu publik dan menyuarakan aspirasinya secara transparan, menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyat. Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola yang modern, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

### **Transparansi dalam Pelayanan Publik**

Transparansi dalam *e-government* mengacu pada pemberian akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap data mengenai kebijakan pemerintah, anggaran, dan layanan publik. Salah satu cara untuk mendorong keterbukaan ini adalah melalui portal informasi digital yang dikelola oleh pemerintah. Portal ini menyediakan informasi lengkap tentang kebijakan, persyaratan, dan biaya pelayanan publik. Contoh nyata dari upaya ini adalah Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat (SIPP), yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data secara langsung tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Dengan adanya portal ini, beban administratif yang sering menghambat efisiensi layanan dapat dikurangi, karena proses pengambilan keputusan publik menjadi lebih cepat dan kebutuhan untuk mengunjungi kantor pemerintah dapat dihilangkan.

Media sosial juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif bagi pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan menggunakan *platform* seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, pemerintah dapat berinteraksi secara lebih langsung dengan masyarakat mengenai kebijakan dan inisiatif baru. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung, menciptakan komunikasi yang bermanfaat antara pemerintah dan masyarakat, interaksi semacam ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat hubungan antara keduanya. Melalui komunikasi langsung di media sosial, pemerintah dapat lebih cepat merespons kebutuhan serta harapan masyarakat dan membangun kepercayaan yang lebih dalam. Hal ini sejalan dengan penelitian Adhiatma dan Mahmudah (2023) yang menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana yang efektif bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi publik dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat.

*E-government* juga memungkinkan pemerintah untuk menyampaikan data kinerja terkait program dan layanan publik. Laporan-laporan ini mencakup statistik serta analisis mendalam tentang efektivitas program yang ada. Transparansi dalam konteks ini sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Ibrahim *et al.* (2023) menyatakan bahwa ketika masyarakat memiliki akses terhadap data kinerja, mereka dapat menilai seberapa baik pemerintah memenuhi harapan mereka. Dengan informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat akan mampu mengevaluasi apakah layanan publik telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perbaikan.

Akses terhadap data anggaran juga merupakan elemen penting dari keterbukaan dalam *e-government*. Ketersediaan data anggaran memungkinkan masyarakat untuk memantau pengeluaran anggaran dan menilai seberapa baik penggunaan dana publik, rincian anggaran daerah dan pemanfaatan uang publik dapat diakses oleh masyarakat melalui situs *web* seperti APBD *Online*. Dengan adanya akses tersebut, masyarakat dapat berperan secara aktif memantau penggunaan anggaran pemerintah, dan menanamkan rasa kepemilikan terhadap

anggaran daerahnya, serta mendorong keterlibatan aktif dalam proses pemerintahan demi mencapai hasil pembangunan yang lebih baik.

#### **Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik**

Akuntabilitas dalam pelayanan publik adalah aspek penting lainnya. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam penyelenggaraan pelayanan publik. *E-government* berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas melalui berbagai tindakan yang terukur. Salah satu contohnya adalah sistem pelaporan berbasis digital yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyampaikan pengaduan atau melaporkan masalah terkait layanan publik melalui *platform* digital. Misalnya, masyarakat bisa dengan mudah hanya dengan menggunakan aplikasi atau situs *web* khusus untuk melaporkan masalah lingkungan. Teknologi ini tidak hanya mempercepat respons pemerintah terhadap keluhan-keluhan tersebut tetapi juga menyediakan data untuk analisis lebih lanjut yang dapat digunakan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas layanan.

Tolbert dan Mossberger (2006) menyatakan bahwa *e-government* dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi korupsi. Maka dari itu, proses audit dan evaluasi terbuka sangat penting bagi akuntabilitas *e-government*. Semua tindakan pemerintah harus transparan kepada publik melalui prosedur audit terbuka, data digital dari *platform e-government* dapat dimanfaatkan untuk membantu evaluasi kinerja yang nyata. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa rencana keuangan digunakan dengan benar dan efisien serta bahwa setiap keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Tarigan *et al.* (2023). Proses audit terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengetahui hasil evaluasi kinerja pemerintah sekaligus mendukung transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya publik.

Selain itu, survei digital atau forum *online* digunakan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, suara masyarakat tidak hanya untuk didengarkan tetapi juga dimasukkan ke dalam kebijakan publik, partisipasi individu dalam pengambilan keputusan memberikan masukan berharga bagi pemerintah dan meningkatkan keterlibatan dari masyarakat dalam kebijakan yang diterapkan. Partisipasi atau keterlibatan aktif masyarakat semacam ini meningkatkan keabsahan pilihan pemerintah serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penerapan *e-government*, pengawasan oleh organisasi yang netral seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Ombudsman sangatlah penting. Organisasi-organisasi ini memiliki peran penting dalam mengaudit sistem *e-government* dan memberikan saran perbaikan demi menjamin pelaksanaan operasi pemerintah yang adil dan transparan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sipayung dan Cristian (2022), keterlibatan lembaga-lembaga independen juga berkontribusi terhadap tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan menjamin bahwa segala tindakan dilakukan dengan integritas. Hal ini sejalan dengan pentingnya peran lembaga independen dalam mencegah kerugian negara dan meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti yang dijelaskan oleh Sipayung *et al.* (2024).

#### **Hambatan dalam Penerapan E-Government**

Di sisi lain, meskipun penerapan *e-government* memberikan banyak manfaat, Pemerintah harus mengatasi sejumlah tantangan yang berat. Salah satu masalah utama tersebut adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai di daerah terpencil, sehingga menyulitkan masyarakat umum untuk mengakses layanan digital dan informasi penting dari pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, sejumlah besar dana harus dikeluarkan untuk membangun infrastruktur TIK di seluruh Indonesia terlebih khususnya di daerah terpencil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam hal mengakses informasi

dan seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat dari teknologi tanpa dibatasi oleh lokasi lingkungan mereka.

Selain rendahnya infrastruktur teknologi yang memadai di daerah terpencil, rendahnya literasi digital juga menjadi masalah utama karena masih banyak orang kesulitan menggunakan teknologi digital dengan baik. Hal ini mengharuskan inisiatif pendidikan dan pelatihan literasi digital untuk membantu setiap individu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, terutama dalam penggunaan *e-government* yang memerlukan pemahaman dasar tentang teknologi dan internet. Program pelatihan harus dirancang agar mudah diakses oleh semua kalangan dari segala usia dan latar belakang pendidikan sehingga setiap dari mereka memiliki kesempatan untuk belajar menggunakan teknologi informasi dengan baik.

Keberhasilan implementasi *e-government* sangat bergantung pada perlindungan data pribadi yang efektif, yang menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik. Dalam proses ini, pemerintah perlu memastikan keamanan informasi sensitif melalui penerapan sistem perlindungan berbasis teknologi terkini yang didukung regulasi yang ketat. Selain itu, prosedur pengamanan harus dirancang untuk mencegah potensi penyalahgunaan data, sejalan dengan penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang bertujuan memperkuat rasa aman masyarakat saat menggunakan layanan digital. Dengan langkah ini, potensi pelanggaran data dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun penerapan *e-government* di Indonesia menimbulkan sejumlah kesulitan, potensi keuntungannya akan sangat besar jika ditangani dengan baik. *E-government* tidak hanya merupakan kemajuan teknologi tetapi juga langkah menuju pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif, semua masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan akses informasi jelas mengenai kebijakan publik dan penggunaan anggaran negara. Hal ini penting untuk mendorong pembangunan pemerintahan yang transparan, efektif, dan berfokus pada rakyat sekaligus membuat setiap individu merasa dihargai sebagai bagian dari proses demokrasi.

### **Strategi untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan E-Government**

Penerapan *e-government* yang optimal di Indonesia memerlukan strategi terintegrasi untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Salah satu langkah prioritas adalah percepatan pembangunan infrastruktur teknologi, khususnya di wilayah pedesaan. Pemerataan akses terhadap layanan digital dapat tercapai melalui penyediaan jaringan internet yang andal serta pengembangan infrastruktur teknologi pendukung lainnya. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat menikmati manfaat dari layanan *e-government* secara merata.

Selanjutnya, pengembangan literasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan pemanfaatan layanan *e-government*. Dengan menyediakan program pelatihan yang komprehensif, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang teknologi informasi dan komunikasi. Langkah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik digital, tetapi juga memperkuat keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan dan politik.

Selain itu, peningkatan perlindungan data pengguna merupakan aspek krusial dalam membangun kepercayaan terhadap layanan berbasis digital. Pemerintah perlu menerapkan sistem keamanan yang mutakhir dan terus diperbarui untuk melindungi kerahasiaan informasi pengguna. Edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan data pribadi juga perlu dilakukan agar pengguna lebih bijak dalam menjaga informasi mereka di dunia digital.

Kemitraan antara pemerintah dan sektor bisnis juga dapat mempercepat pengembangan dan implementasi teknologi informasi. Kolaborasi ini membuka peluang untuk pendanaan inovatif, pengembangan solusi teknologi yang lebih canggih, dan penciptaan layanan publik

yang efisien. Dengan bekerja sama, sektor publik dan swasta dapat mendorong inovasi yang lebih signifikan dalam layanan *e-government*.

Evaluasi dan observasi berkala menjadi langkah penting untuk memastikan keberhasilan implementasi *e-government*. Dengan melakukan penilaian secara rutin, pemerintah dapat mengidentifikasi kendala yang ada dan mengembangkan rencana strategis untuk peningkatan layanan di masa depan. Langkah ini juga membantu memastikan bahwa setiap inisiatif yang diluncurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang nyata.

Dengan mengadopsi strategi-strategi tersebut, penerapan *e-government* di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor aktif dalam proses pembangunan. *E-government*, dengan demikian, menjadi instrumen penting dalam memodernisasi administrasi publik sekaligus memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

### **Gagasan Tarakan *Smart City*: Pemanfaatan *E-Government* untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Layanan Publik**

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, kota-kota di seluruh dunia berlomba-lomba untuk mengimplementasikan konsep *smart city* guna meningkatkan kualitas hidup warganya. Pada prinsipnya, *smart city* adalah sebuah konsep pengembangan kota yang mengintegrasikan TIK dalam berbagai aspek kehidupan perkotaan, seperti pemerintahan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan kota yang lebih efisien, berkelanjutan, dan layak huni.

Tarakan sebagai salah satu kota penting di Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan diri menjadi *smart city*. Dengan letak geografis yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah, Tarakan dapat memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan mengatasi berbagai tantangan perkotaan, seperti kemacetan, banjir, dan kesenjangan sosial. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Ninčević Pašalić, Čukušić, dan Jadrić (2021), pengembangan *smart city* juga perlu memperhatikan aspek kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sebelum mengimplementasikan berbagai program *smart city*.

Kota Tarakan, sebagai kota berkembang di Indonesia, menunjukkan komitmen kuat dalam mengadopsi konsep *smart city* untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama inisiatif ini adalah penerapan *e-government* guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Melalui optimalisasi TIK, pemerintah daerah berupaya menciptakan layanan yang efisien, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya sejalan dengan tren global dalam pemanfaatan TIK untuk mendukung *good governance*, tetapi juga berperan penting dalam mendorong partisipasi publik secara aktif dan berkelanjutan, sebagaimana diungkapkan oleh Sipayung dan Wahyudi (2022).

Pemanfaatan *e-government* di Kota Tarakan diwujudkan melalui inovasi strategis, salah satunya pengembangan portal *web* pemerintah yang menyediakan akses informasi publik secara transparan dan akuntabel. Portal ini tidak hanya menghadirkan informasi penting, seperti kebijakan, anggaran, dan laporan kinerja pemerintah, tetapi juga menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, serta saran, sehingga tercipta komunikasi dua arah yang efektif. Selain itu, aplikasi "Tarakan Satu Data" hadir sebagai portal data terpadu yang membuka akses publik terhadap berbagai informasi, mulai dari data anggaran dan kinerja program hingga statistik pembangunan daerah. Melalui inisiatif ini, masyarakat didorong untuk aktif memantau, mengevaluasi kinerja pemerintah, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan, menciptakan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif.

Pemerintah Kota Tarakan, selain mengembangkan "Tarakan Satu Data," telah menghadirkan berbagai inovasi *e-government* guna meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai sektor. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah pengembangan aplikasi *mobile* terintegrasi yang mencakup layanan perizinan, pembayaran pajak, dan administrasi kependudukan. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mengunjungi kantor pemerintah secara langsung. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Jogja Smart Service* yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, di mana pemanfaatan teknologi informasi difokuskan pada penyediaan layanan publik yang terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sebagai ilustrasi, studi Saputra *et al.* (2023) menunjukkan bahwa *Jogja Smart Service* berhasil meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik, sehingga dapat menjadi model inspiratif bagi Kota Tarakan dalam optimalisasi layanan berbasis digital.

Kota Tarakan memanfaatkan media sosial sebagai saluran strategis untuk meningkatkan partisipasi publik dan menyebarkan informasi secara luas dan efisien. Media sosial memungkinkan pemerintah menjangkau masyarakat dengan cepat, sekaligus menerima umpan balik langsung untuk pengembangan kebijakan yang lebih responsif. Selain itu, *platform* ini digunakan untuk edukasi dan sosialisasi berbagai program pemerintah, yang mendukung implementasi prinsip *smart city* melalui penguatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota secara berkelanjutan.

Selain media sosial, Kota Tarakan juga mengadopsi *e-government* untuk mengoptimalkan efisiensi birokrasi sekaligus mencegah praktik KKN. Dengan sistem administrasi dan layanan perizinan *online*, proses birokrasi menjadi lebih transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mengurangi interaksi langsung antara warga dan aparat pemerintah, sehingga memperkuat akuntabilitas dan integritas dalam tata kelola pemerintahan.

Kebijakan "Tarakan *Smart City*" membutuhkan pendekatan strategis yang komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai visi transformasi kota berbasis teknologi. Strategi ini harus mencakup penguatan infrastruktur TIK yang merata, meliputi akses internet cepat, jaringan fiber optik, dan pusat data terpadu. Infrastruktur yang kuat akan menjadi fondasi untuk mendorong kemajuan di berbagai sektor, sekaligus memastikan bahwa seluruh wilayah Tarakan dapat terhubung secara optimal.

Selanjutnya, pemanfaatan *e-government* harus diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis daring, sistem informasi manajemen daerah yang terintegrasi, serta *platform* partisipasi masyarakat yang inklusif. Selain itu, kebijakan ini bertujuan mendukung pengembangan ekonomi digital dengan memfasilitasi *startup*, UMKM, dan industri kreatif melalui inkubator bisnis, pelatihan digital, serta akses pembiayaan yang terjangkau (Agus Yulistiyono *et al.* (2023) dan Hamid *et al.* (2024). Sebagaimana diungkapkan Bangkara *et al.* (2022), pemerintah berkomitmen mengintegrasikan teknologi dalam layanan kesehatan dan pengembangan tenaga medis, sejalan dengan upaya membangun ekonomi digital yang berdaya saing di kota Tarakan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama yang tidak terpisahkan dari aspek ekonomi (Sipayung, Dwiprigitaningtias, Nugroho, dan Bernard, 2023). Optimalisasi teknologi menjadi kunci dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti melalui penerapan sistem pemantauan kualitas udara dan air, pengelolaan sampah terpadu, serta transportasi publik berbasis ramah lingkungan. Sebagaimana dijelaskan oleh Sipayung *et al.* (2023), sistem informasi memainkan peran strategis dalam pengelolaan data lingkungan, termasuk data pencemaran, keanekaragaman hayati, dan penggunaan sumber daya alam. Informasi yang terintegrasi ini memungkinkan pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat dan



strategis dalam merancang kebijakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi untuk menyediakan layanan publik yang lebih terintegrasi (Sipayung, 2022). Pemerintah dapat mengembangkan sistem informasi kesehatan, *platform* pembelajaran *daring*, dan sistem keamanan terpadu sebagai solusi berbasis teknologi. Menurut Wikansari *et al.* (2023), penerapan pelayanan terpadu satu pintu (*integrated one-stop model*) mampu meningkatkan aksesibilitas layanan publik sekaligus mendorong efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat. Langkah-langkah ini mendukung terciptanya sinergi antar aspek kota, sehingga visi "Tarakan *Smart City*" sebagai kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing dapat terwujud secara holistik.

Implementasi *e-government* di Kota Tarakan masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius. Salah satu isu utama adalah kesenjangan digital yang signifikan di tengah masyarakat, di mana akses terhadap internet dan perangkat digital belum merata. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital, yang membatasi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi secara optimal. Selain itu, aspek keamanan data dan privasi menjadi isu krusial yang memerlukan pengelolaan cermat agar informasi yang dikumpulkan melalui *platform e-government* tetap terlindungi dari potensi penyalahgunaan.

Untuk menghadapi tantangan pengembangan *e-government* di Kota Tarakan, diperlukan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan guna memastikan pemerataan manfaat teknologi informasi. Pertama, perluasan akses infrastruktur digital harus menjadi prioritas dengan menyediakan konektivitas internet yang merata, terutama di wilayah terpencil dan perdesaan. Selain itu, penyediaan fasilitas TIK yang memadai menjadi langkah strategis untuk mendorong inklusi digital. Selanjutnya, literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan melalui pelatihan, edukasi, dan sosialisasi yang menasar berbagai kalangan, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat berpenghasilan rendah, agar mereka dapat memanfaatkan layanan digital secara maksimal.

Di sisi lain, penguatan keamanan data dan privasi menjadi esensial dengan menerapkan sistem keamanan yang sesuai standar internasional guna mencegah penyalahgunaan data. Kapasitas aparatur pemerintah juga harus ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan sistem *e-government* yang efektif dan pelayanan publik berbasis TIK yang optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui dorongan aktif untuk memberikan masukan terhadap pengembangan layanan digital pemerintah. Dengan sinergi seluruh strategi tersebut, pengelolaan *e-government* dapat berjalan lebih efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai pembelajaran, Pemerintah Kota Tarakan dapat mempelajari dan mengadopsi beberapa kebijakan dan strategi dari *smart city* lain yang telah berhasil dalam mengimplementasikan *e-government*, seperti "Jogja *Smart Service*" di Yogyakarta. *Jogja Smart Service* merupakan *platform e-government* terpadu yang menyediakan berbagai layanan publik secara *online*, mulai dari perizinan, pembayaran, pengaduan, hingga informasi publik. *Platform* ini juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.



Gambar: Tampilan dan Fitur *Jogja Smart Services* (JSS), sumber: <https://bit.ly/JogjaSmartServices>

Pengembangan *Jogja Smart Service* memberikan inspirasi penting bagi implementasi kebijakan "Tarakan *Smart City*" melalui integrasi berbagai layanan publik dalam satu *platform*. Langkah ini memungkinkan akses layanan yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat, sekaligus menyederhanakan birokrasi. Pemerintah Kota Tarakan dapat mengadopsi pendekatan ini dengan menciptakan *platform* terpadu yang mencakup layanan seperti perizinan, pembayaran pajak, hingga pengaduan masyarakat. Pengintegrasian tersebut akan mempercepat proses pelayanan sekaligus meningkatkan kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah.

Selain itu, *Jogja Smart Service* mengedepankan partisipasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan menyediakan kanal seperti forum *online*, survei digital, dan aplikasi pengaduan, masyarakat dapat lebih aktif menyampaikan aspirasi serta masukan kepada pemerintah. Pemerintah Kota Tarakan dapat menerapkan strategi serupa untuk membangun komunikasi dua arah yang efektif, di mana data yang terkumpul dapat menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan yang responsif dan inklusif. Implementasi ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, *Jogja Smart Service* telah membuktikan keberhasilannya dalam mendorong promosi pelaku usaha lokal melalui *platform* digital. Dengan langkah ini, pemerintah mampu mendukung pelaku ekonomi kreatif dan meningkatkan kunjungan wisata. Pemerintah Kota Tarakan dapat mengembangkan aplikasi yang memuat direktori usaha lokal, pemesanan tiket wisata, serta *platform e-commerce* untuk memasarkan produk unggulan daerah. Inisiatif tersebut tidak hanya mendorong perekonomian lokal, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan daya tarik pariwisata.

Lebih jauh, keberhasilan *Jogja Smart Service* juga didukung oleh beberapa kebijakan strategis yang relevan untuk diterapkan di Tarakan, seperti pengembangan *platform e-government* yang mudah diakses, integrasi aplikasi lintas sektor pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi big data untuk mendukung perencanaan pembangunan. Tidak kalah penting, penguatan sistem keamanan data harus menjadi prioritas untuk melindungi informasi pribadi masyarakat. Dengan adopsi pendekatan ini, "Tarakan *Smart City*" dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi *e-government* di Kota Tarakan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk mencapai hal ini,

penting bagi pemerintah daerah mengadopsi pendekatan inovatif yang sesuai dengan karakteristik lokal, seperti pengembangan aplikasi pemantauan kualitas udara terintegrasi dengan sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, implementasi sistem transportasi cerdas berbasis informasi geografis (SIG) dapat mengoptimalkan efisiensi rute dan jadwal transportasi publik, sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.

Selain itu, studi banding dengan kota-kota yang telah berhasil menerapkan konsep *smart city*, seperti *Jogja Smart Service*, menjadi langkah strategis dalam memperkaya wawasan dan mempelajari praktik terbaik. Melalui kolaborasi dan berbagi pengalaman, Kota Tarakan dapat merancang solusi yang lebih efektif dan berdaya guna untuk mendukung visi "Tarakan *Smart City*." Dengan demikian, integrasi teknologi yang selaras dengan kebutuhan lokal dapat diwujudkan secara berkelanjutan, memperkuat posisi Kota Tarakan sebagai kota yang adaptif terhadap tantangan modern.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji pemanfaatan *e-government* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *e-government* memiliki potensi besar untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui *e-government*, pemerintah dapat menyediakan informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses, memfasilitasi partisipasi publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan memperkuat akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

*Novelty* dari penelitian ini adalah gagasan "Tarakan *Smart City*" yang mengintegrasikan *e-government* dengan berbagai aspek kehidupan perkotaan lainnya, seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Gagasan ini menawarkan sebuah model pengembangan *smart city* yang komprehensif dan terintegrasi, yang dapat dijadikan contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Kebijakan "Tarakan *Smart City*" yang mencakup pengembangan infrastruktur TIK, pemanfaatan *e-government*, pengembangan ekonomi digital, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan sebuah inovasi yang patut diapresiasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *e-government* dan *smart city*. Secara khusus, penelitian ini menunjukkan bahwa *e-government* tidak hanya berperan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kualitas layanan publik. Gagasan "Tarakan *Smart City*" menawarkan sebuah kerangka konseptual yang menunjukkan bagaimana *e-government* dapat diintegrasikan dengan berbagai aspek kehidupan perkotaan untuk menciptakan kota yang lebih baik.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah daerah, khususnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi pemanfaatan *e-government* dan pengembangan *smart city*. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur TIK dan literasi digital masyarakat sebagai fondasi bagi implementasi *e-government* dan *smart city*. Kedua, pemerintah daerah perlu mengembangkan berbagai aplikasi dan *platform e-government* yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketiga, pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program *e-government* dan *smart city*. Dengan demikian, pemanfaatan *e-government* dan pengembangan *smart city* dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

#### 5. Daftar Pustaka

- Abu-Shanab, E., & Harb, Y. (2019). E-government research insights: Text mining analysis. *Electronic Commerce Research and Applications*, 38. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100892>

- Adhiatma, P. Y., & Mahmudah, S. M. (2023). Optimalisasi Integrasi Media Sosial Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 6(2), 232–246. <https://doi.org/10.32509/pustakom.v6i2.2648>
- Agus Yulistiyono, Suryati, Riauwati, J., Purbaningsih, Y., Helviani, Sipayung, B., ... Maghfur, I. (2023). *Manajemen Risiko Usaha Mikro*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Bangkara, B. M. A. S. A., Maruf, I. R., Sipayung, B., Rohayati, Y., & Indah, D. (2022). Understanding the Efficiency of Technological Transformation in the Public Health Service Act: A Technocultural Health Perspective. *International Journal of Health Sciences (IJHS)*, 6(April), 12246–12261. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns5.11985>
- Fuad, M., Hastutik, S., Ernayani, R., Sipayung, B., Noor, L. S., Aulia, D., ... Ayu Indira Dewiningrat. (2023). Digital Finance. In *Yayasan Cendikia Mulia Mandiri* (Vol. 6). Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Hamid, A., Widjaja, W., S, S., Napu, F., & Sipayung, B. (2024). The Role of Fintech on Enchancing Financial Literacy and Inclusive Financial Management in MSMEs. *TECHNOVATE: Journal of Information Technology and Strategic Innovation Management*, 1(2), 81–88. Retrieved from <https://www.globalresearcher.net/index.php/technovate/article/view/33>
- Hendrayady, Agus; Sari, Kartika; Novaria, Rachmawati; Deni, Asep; Wahyuni, Endang; Adia, Viera Restuani; Susilatun, Hamidah Rosidanti; Sipayung, Baren; Damayanti, Febriyani; Maesarini, I. W. (2024). Teori Administrasi Publik. In Y. Fitriana (Ed.), *Teori Administrasi Publik*. Jombang: Askara Sastra Media. Retrieved from <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vPsAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+publik&ots=7fIw0Mdhz2&sig=tqEnZEM08ftIL4Tux6m4OWTOat8>
- Ibrahim, A. H. H., Baharuddin, T., & Wance, M. (2023). Bibliometric Analysis of E-Government and Trust: A Lesson for Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(3), 269–284. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1303>
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for Performing Systematic Reviews. *Keele, UK, Keele University*, 33(2004), 1–26.
- Musri, Pasaribu, F. R., Khudri, N., Ariyati, Y., & Rahman, Y. (2024). Implementasi E-Government dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Negara. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 8888–8893. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.30320>
- Nainggolan, H., Ulya, Z., Kusumadewi, R. N., Selasi, D., Wahyuningsih, R. S. H., Setiawan, R., ... Ridwan, H. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi* (Vol. 3). Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Ninčević Pašalić, I., Čukušić, M., & Jadrić, M. (2021). Smart city research advances in Southeast Europe. *International Journal of Information Management*, 58. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102127>
- Rifdan, Haerul, Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). Analisis Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 4(1), 49–61. Retrieved from <https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/389>

- Saputra, M. E., Chandra, A., Danti, R., Lestari, P., Utami, B. A. R., & Andika, F. (2023). Penyusunan Instrumen Kebijakan Smart City (Studi Program Jogja Smart Service Di Kota Yogyakarta). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 23–29. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.148>
- Sipayung, B. (2022). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Sipayung, B., & Cristian, R. D. (2022). The Influence of the Implementation of Regional Autonomy on Regional Financial Management of East Kalimantan Province. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 356–368. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i3.92>
- Sipayung, B., Dwiprigitaningtias, I., Nugroho, R. J., & Bernard, B. (2023). Environmental Law Enforcement In Indonesia In Terms Of The Concept Of Sustainable Development. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(03), 197–203. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.253>
- Sipayung, B., Mulyati, & Cristian, R. D. (2024). Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(2), 176–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1281>
- Sipayung, B., Rawung, M., Malalantang, D. D., Mulyani, Astuti, R., Sari, I. R., ... Wangania, T. H. (2023). Sistem Informasi pada Manajemen Risiko. In *Yayasan Cendikia Mulia Mandiri*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Sipayung, B., W.A., D., & Purwoyo. (2022). Teori Organisasi Cerdas dan Perbandingannya dengan Teori Birokrasi Menurut Max Weber. *Literatus*, 4(1), 139–145. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i1.676>
- Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan Good Governance dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12323–14334.
- Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia. *National Proceeding E-Indonesia*, (semnasIF), 46–59. Bandung: ITB. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/175130/tantangan-dan-hambatan-dalam-implementasi-e-government-di-indonesia>
- Tarigan, W. J., Lestari, N. P., Sutrisno, Evrina, Sudewi, P. S., T., J., ... Gobel, L. Van. (2023). Manajemen Keuangan. In *Yayasan Cendikia Mulia Mandiri*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government. *Public Administration Review*, 66(3), 354–369. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00594.x>
- Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., Sipayung, B., Hutasoit, W. L., Rijal, K., ... Sudarmanto, E. (2023). *Tata Kelola Sektor Publik*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Wikansari, R., Sayuti, M., Sipayung, B., Defitri, S. Y., Luturmas, Y., & Kenney, L. M. (2023). Implementation of Integrated One Stop Model in Public Services: An Analysis of Human Resources Performance Competency Development in The Indonesian Government Sector. *MULTICULTURAL EDUCATION*, 9(01), 16–27.